



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT TEKNOLOGI DAN INFORMASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JEFRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA TIK
3. NHK : 112635

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 940.399.031

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/30 m2 di TANGERANG, WARISAN Rp. 169.950.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/45 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 770.449.031

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 230.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 188.000.000
2. MOTOR, HONDA GL PRO SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 86.095**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.176.485.126**III. HUTANG** Rp. 765.449.031**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 411.036.095

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.